
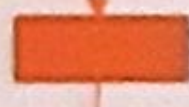


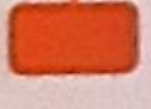




KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

 KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	Nomor SOP	: 07 / PPID / KASN / OK / 2020
	Tanggal Pembuatan	: ..25... Agustus 2020
	Tanggal Revisi	: Agustus 2020
	Tanggal Efektif	: 26 Agustus 2020
	Disahkan Oleh	: Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara  (Agus Pramusinto)
Nama SOP	: SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Aparatur Sipil Negara	1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen Sengketa Informasi Publik 2. Softcopy atau Hardcopy Permohonan dan Keberatan Informasi Publik 3. Perangkat Keras: Laptop, Printer, Pulpen, dan Cap KASN	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPID KASN tidak berjalan	Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik	

**SOP PPID KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PROSEDUR PENANGANAN SENKETA INFORMASI PUBLIK**

No.	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pengarah & Pertimbangan Pelayanan Informasi	Syarat	Waktu	Output	
1.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat				Relaas Persidangan dari Komisi Informasi Pusat	1 HK	Disposisi	
2.	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani Sengketa Informasi Publik				Disposisi	1 HK	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3.	Menganalisis dan membuat Pertimbangan Tertulis terkait Sengketa Informasi Publik yang dihadapi				Surat Kuasa dari Atasan PPID	3 HK	1. Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi Publik yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4.	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat				Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi Publik yang dihadapi	100 HK	1. Risalah Berita Acara Persidangan 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	Jangka Waktu Sengketa Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik